

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

- Adi Sujatno. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri) Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Andi Wijaya Rivai, 2014, "Buku Pintar Pemasyarakatan", Jakarta. Lembaga Kajian Pemasyarakatan
- Bambang Poernomo, 2010, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty
- C.I. Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djembatan, Jakarta
- Cesare Beccaria dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, Lokakarya Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Bina Cipta, Jakarta
- Departemen Hukum dan HAM. 2009. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan
- Djisman Samosir, 2012, Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Dwidja Prijatno, 2014, Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, Utomo
- Gultom Maidin, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mahsur Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011, Hukum Penitensier, PT Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, L, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, Alumni, Bandung
- Muladi, 2005, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, "Pengantar Hukum Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, 2018, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang, 2008, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung

R. Abdoel Djamali, 2006, Pengantar Hukum Indonesia Edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Roeslan Saleh, 1982, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2009, Mengenal Hukum dan Pembinaan di Indonesia, Yogyakarta, Mandar Maju

Suwandi, 2004. Instrumen Penegakan HAM di Indonesia, Refika Aditama, Bandung

II. Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang *Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia*